

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of environmental policies by the local government in efforts to preserve the Bukit Gundaling area in Karo Regency. The research focuses on three main aspects: the policies implemented by the local government, the weaknesses in environmental conservation regulations, and the role of the community in supporting these efforts. This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach, utilizing observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The findings indicate that the implementation of environmental policies in Bukit Gundaling remains limited and is not yet supported by specific regulations such as regional or regent regulations that comprehensively govern environmental management. The local government's efforts include routine cleaning activities, provision of waste disposal facilities, and monitoring conducted by field officers. However, several obstacles persist, including budget constraints, lack of coordination among stakeholders, inadequate supporting facilities, and low environmental awareness among some visitors. On the other hand, the community demonstrates a relatively good level of participation through mutual cooperation activities and efforts to maintain environmental cleanliness. Nevertheless, community involvement in the policy-making process is still not optimal. Based on these findings, it can be concluded that the implementation of environmental policies in the Bukit Gundaling area has not been fully effective. Therefore, strengthening regulatory frameworks, improving inter-agency coordination, and enhancing community empowerment are necessary to achieve sustainable environmental conservation.

Keywords: *policy implementation, environmental management, local government, conservation, Bukit Gundaling*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan lingkungan oleh pemerintah daerah dalam upaya melestarikan kawasan Bukit Gundaling di Kabupaten Karo. Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama: kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah, kelemahan dalam peraturan konservasi lingkungan, dan peran masyarakat dalam mendukung upaya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan lingkungan di Bukit Gundaling masih terbatas dan belum didukung oleh peraturan khusus seperti peraturan daerah atau kabupaten yang secara komprehensif mengatur pengelolaan lingkungan. Upaya pemerintah daerah meliputi kegiatan pembersihan rutin, penyediaan fasilitas pembuangan sampah, dan pemantauan yang dilakukan oleh petugas lapangan. Namun, beberapa kendala masih ada, termasuk kendala anggaran, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, fasilitas pendukung yang tidak memadai, dan rendahnya kesadaran lingkungan di kalangan sebagian pengunjung. Di sisi lain, masyarakat menunjukkan tingkat partisipasi yang relatif baik melalui kegiatan kerja sama dan upaya menjaga kebersihan lingkungan. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan masih belum optimal. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan lingkungan di wilayah Bukit Gundaling belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, penguatan kerangka peraturan, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk mencapai konservasi lingkungan yang berkelanjutan.

Kata kunci: implementasi kebijakan, pengelolaan lingkungan, pemerintah daerah, konservasi, Bukit Gundaling.

